



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 42/M-DAG/PER/12/2011**

**TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2012.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah provinsi.
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kegiatan yang bersifat non-fisik adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan perdagangan dalam pemerintahan.
13. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dalam negeri.
14. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Dirjen SPK adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di standardisasi dan perlindungan konsumen.

15. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan luar negeri.
16. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang selanjutnya disebut Dirjen PEN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan ekspor nasional.
17. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Kepala Bappebti adalah Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan perdagangan berjangka komoditi.
18. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.
19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan dekonsentrasi bidang perdagangan di daerah.

BAB III LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Menteri kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang bersifat non fisik.

- (3) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan dalam Renja K/L yang mengacu pada RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2012.

BAB IV **PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI**

Pasal 4

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada 33 gubernur.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- (3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), gubernur harus:
 - a. melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan dekonsentrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
 - b. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
- (2) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria dan kebijakan Pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan SKPD provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan yang meliputi:
 - a. Kepala SKPD sebagai kuasa pengguna anggaran/barang;
 - b. Pejabat pembuat komitmen;
 - c. Pejabat penguji tagihan/penanda tangan surat perintah membayar;
 - d. Pejabat Akuntansi dan Bendahara pengeluaran.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) SKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan anggaran dengan berpedoman pada norma standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri melalui Dirjen PDN, Dirjen SPK, Dirjen Daglu, Dirjen PEN atau Kepala Bappebti mengenai:
 - a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal 7

SKPD provinsi dilarang melakukan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang mengakibatkan perubahan output kegiatan termasuk perubahan pagu antar program dan pagu antar kegiatan.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD Provinsi bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi.
- (2) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur dan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah dan gubernur sebagai wakil Pemerintah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian anggaran Kementerian Tahun 2012 melalui Dana Dekonsentrasi bidang perdagangan.
- (2) Rincian alokasi anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012 untuk masing-masing kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara di daerah.
- (4) Tata cara penyaluran dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi merupakan BMN.
- (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi.

- (3) SKPD provinsi melakukan penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan barang milik negara.
- (4) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah.
- (5) Dalam hal BMN dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan BMN tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai barang milik daerah.
- (6) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan BMN/Barang Milik Daerah.
- (7) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD provinsi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan anggaran;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan barang.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD provinsi menyampaikan laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada:
 - a. Menteri melalui aplikasi *e-Monitoring* Kementerian setiap dilakukan pencairan anggaran; dan
 - b. Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah setiap triwulan dan setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Kepala SKPD provinsi menyampaikan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berupa:
 - a. Laporan keuangan yang disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah; dan
 - b. Laporan barang milik negara yang disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
- (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri u.p. Sekretaris Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen PDN, Dirjen SPK, Dirjen Daglu, Dirjen PEN atau Kepala Bappebti.

Pasal 13

Penatausahaan keuangan dan barang milik negara dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan barang milik negara dalam pelaksanaan APBN Tugas Pembantuan dan APBD.

Pasal 14

- (1) Tata cara penyusunan laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- (2) Tata cara penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

- (3) Tata cara penyusunan laporan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.

Pasal 15

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur.
- (2) Gubernur selaku penerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, Dirjen PDN, Dirjen SPK, Dirjen Daglu, Dirjen PEN dan Kepala Bappebti.
- (5) Norma, standar, pedoman, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur.
- (6) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, dan reviu atas laporan keuangan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah.

BAB X
PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN

Pasal 17

- (1) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur, jika :
 - a. Menteri mengubah kebijakan;
 - b. Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur.
- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana dekonsentrasi.

BAB XI
SANKSI

Pasal 18

- (1) SKPD Provinsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), SKPD Provinsi dikenakan sanksi penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.

- (3) Sanksi penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.

BAB XII PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 42/M-DAG/PER/12/2011

TANGGAL : 20 Desember 2011

RINCIAN PEMBIAYAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2012

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	GUBERNUR ACEH	ACEH	2,306,078,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	765,660,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitas Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	361,726,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektivitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	838,692,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		3. Pelaksanaan Kegiatan Arus Informasi Data Ekspor Impor		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		3. Partisipasi pada Forum Koordinasi Perdagangan Lintas Batas		
		Layanan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1 Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitas Ekspor Impor		
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	340,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1 Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2 Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1 Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
2	GUBERNUR SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	2,096,706,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	815,000,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitas Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	347,162,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrolagian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	639,544,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		Layanan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1 Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitas Ekspor Impor		
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	295,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1 Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2 Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1 Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
3	GOVERNOR SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT	2,332,957,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	814,931,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitas Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	323,482,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrolgian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	583,944,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		Layanan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1 Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitas Ekspor Impor		
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	300,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1 Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2 Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1 Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
		PENINGKATAN FASILITASI PASAR LELANG DAN SISTEM RESI GUDANG DAERAH	310,600,000	BAPPEBTI
		Pengembangan Kegiatan Pasar Lelang Daerah		
		Penyelenggaraan Pasar Lelang		
		Pengembangan Pranata Pendukung Pasar Lelang		
4	GUBERNUR RIAU	RIAU	2,195,936,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	769,000,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	369,822,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrolagian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	584,364,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		3. Partisipasi pada Forum Koordinasi Perdagangan Lintas Batas		
		Layanan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1 Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitasi Ekspor Impor		
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	280,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1 Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2 Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1 Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
		PENINGKATAN FASILITASI PASAR LELANG DAN SISTEM RESI GUDANG DAERAH	192,750,000	BAPPEBTI
		Pengembangan Kegiatan Pasar Lelang Daerah		
		Penyelenggaraan Pasar Lelang		
		Pengembangan Pranata Pendukung Pasar Lelang		
5	GUBERNUR JAMBI	JAMBI	2,089,686,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	715,000,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	314,462,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	530,724,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		Layanan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1 Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitas Ekspor Impor		
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	295,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1 Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2 Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1 Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
		PENINGKATAN FASILITASI PASAR LELANG DAN SISTEM RESI GUDANG DAERAH	234,500,000	BAPPEBTI
		Pengembangan Kegiatan Pasar Lelang Daerah		
		Penyelenggaraan Pasar Lelang		
		Pengembangan Pranata Pendukung Pasar Lelang		
6	GUBERNUR SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN	2,098,216,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	765,000,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitas Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	493,752,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	529,464,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		Layanan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1 Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitas Ekspor Impor		
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	310,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1 Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2 Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1 Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
7	GUBERNUR BENGKULU	BENGKULU	1,832,096,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	694,920,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitas Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	305,402,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	531,774,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		Layanan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1 Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitas Ekspor Impor		
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	300,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1 Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2 Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1 Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
8	GUBERNUR LAMPUNG	LAMPUNG	2,162,511,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	793,300,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitas Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	297,522,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrololgan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	524,984,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Pemmasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		Layanan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1 Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitas Ekspor Impor		
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	315,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1 Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2 Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1 Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
		PENINGKATAN FASILITASI PASAR LELANG DAN SISTEM RESI GUDANG DAERAH	231,705,000	BAPPEBTI
		Pengembangan Kegiatan Pasar Lelang Daerah		
		Penyelenggaraan Pasar Lelang		
		Pengembangan Pranata Pendukung Pasar Lelang		
9	GUBERNUR BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	1,964,114,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	715,020,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitas Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	443,602,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	525,492,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		Layanan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1 Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitas Ekspor Impor		
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	280,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1 Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2 Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1 Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
10	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	1,759,542,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	719,860,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitas Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	384,682,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrolagian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	450,000,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		3. Partisipasi pada Forum Koordinasi Perdagangan Lintas Batas		
		Layanan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1 Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitas Ekspor Impor		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	205,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1 Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2 Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1 Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
11	GUBERNUR DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	1,989,037,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	677,700,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	394,362,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrololgan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	500,000,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Layanan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	210,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1 Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2 Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1 Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
		PENINGKATAN FASILITASI PASAR LELANG DAN SISTEM RESI GUDANG DAERAH	206,975,000	BAPPEBTI
		Pengembangan Kegiatan Pasar Lelang Daerah		
		Penyelenggaraan Pasar Lelang		
		Pengembangan Pranata Pendukung Pasar Lelang		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
12	GUBERNUR JAWA BARAT	JAWA BARAT	2,639,047,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	790,000,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	396,612,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	550,000,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Layanan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitasi Ekspor Impor		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	300,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
		PENINGKATAN FASILITASI PASAR LELANG DAN SISTEM RESI GUDANG DAERAH	602,435,000	BAPPEBTI
		Pengembangan Kegiatan Pasar Lelang Daerah		
		Penyelenggaraan Pasar Lelang		
		Pengembangan Pranata Pendukung Pasar Lelang		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
13	GUBERNUR JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	2,660,096,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	759,775,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	362,482,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrolgian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	629,954,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pengawasan Barang Impor		
		Layanan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitasi Ekspor Impor		
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	295,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
		PENINGKATAN FASILITASI PASAR LELANG DAN SISTEM RESI GUDANG DAERAH	612,885,000	BAPPEBTI
		Pengembangan Kegiatan Pasar Lelang Daerah		
		Penyelenggaraan Pasar Lelang		
		Pengembangan Pranata Pendukung Pasar Lelang		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
14	GUBERNUR DI YOGYAKARTA	DI YOGYAKARTA	2,374,162,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	770,000,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	301,212,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	550,000,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		Layanan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitasi Ekspor Impor		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	300,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
		PENINGKATAN FASILITASI PASAR LELANG DAN SISTEM RESI GUDANG DAERAH	452,950,000	BAPPEBTI
		Pengembangan Kegiatan Pasar Lelang Daerah		
		Penyelenggaraan Pasar Lelang		
		Pengembangan Pranata Pendukung Pasar Lelang		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
15	GUBERNUR JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	2,770,690,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	760,000,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	391,867,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	664,248,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		Layanan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitasi Ekspor Impor		
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	315,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
		PENINGKATAN FASILITASI PASAR LELANG DAN SISTEM RESI GUDANG DAERAH	639,575,000	BAPPEBTI
		Pengembangan Kegiatan Pasar Lelang Daerah		
		Penyelenggaraan Pasar Lelang		
		Pengembangan Pranata Pendukung Pasar Lelang		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
16	GUBERNUR BANTEN	BANTEN	1,934,842,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	685,000,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	439,842,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrolagian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	500,000,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		Layanan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	310,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
17	GUBERNUR BALI	BALI	2,480,896,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	787,110,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	352,212,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrolagian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	585,974,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		Layanan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitas Ekspor Impor		
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	300,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
		PENINGKATAN FASILITASI PASAR LELANG DAN SISTEM RESI GUDANG DAERAH	455,600,000	BAPPEBTI
		Pengembangan Kegiatan Pasar Lelang Daerah		
		Penyelenggaraan Pasar Lelang		
		Pengembangan Pranata Pendukung Pasar Lelang		
18	GUBERNUR NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA BARAT	2,500,622,000	
	BARAT	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	798,000,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitas Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	389,372,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	550,000,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Pemasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		Layanan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitas Ekspor Impor		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	315,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
		PENINGKATAN FASILITASI PASAR LELANG DAN SISTEM RESI GUDANG DAERAH	448,250,000	BAPPEBTI
		Pengembangan Kegiatan Pasar Lelang Daerah		
		Penyelenggaraan Pasar Lelang		
		Pengembangan Pranata Pendukung Pasar Lelang		
19	GUBERNUR NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA TIMUR	2,071,472,000	
	TIMUR	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	817,480,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitas Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	388,992,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrolagian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	550,000,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		3. Partisipasi pada Forum Koordinasi Perdagangan Lintas Batas		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	315,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
		Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
20	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	2,183,536,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	635,000,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	348,337,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	632,824,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		3. Partisipasi pada Forum Koordinasi Perdagangan Lintas Batas		
		Layanan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitasi Ekspor Impor		
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	315,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
		PENINGKATAN FASILITASI PASAR LELANG DAN SISTEM RESI GUDANG DAERAH	252,375,000	BAPPEBTI
		Pengembangan Kegiatan Pasar Lelang Daerah		
		Penyelenggaraan Pasar Lelang		
		Pengembangan Pranata Pendukung Pasar Lelang		
21	GUBERNUR KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	1,874,206,000	
	TENGAH	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	690,000,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	355,052,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrololgiaan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	534,154,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		Layanan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitas Ekspor Impor		
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	295,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
22	GUBERNUR KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	1,888,036,000	
	SELATAN	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	670,400,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitas Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	323,412,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	584,224,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		Layanan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitasi Ekspor Impor		
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	310,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
23	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	1,942,826,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	648,000,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	375,352,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	639,474,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		3. Partisipasi pada Forum Koordinasi Perdagangan Lintas Batas		
		Layanan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitas Ekspor Impor		
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	280,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
24	GUBERNUR SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	2,650,986,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	767,000,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitas Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	337,292,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	698,014,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		3. Partisipasi pada Forum Koordinasi Perdagangan Lintas Batas		
		Layanan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitasi Ekspor Impor		
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	310,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
		PENINGKATAN FASILITASI PASAR LELANG DAN SISTEM RESI GUDANG DAERAH	538,680,000	BAPPEBTI
		Pengembangan Kegiatan Pasar Lelang Daerah		
		Penyelenggaraan Pasar Lelang		
		Pengembangan Pranata Pendukung Pasar Lelang		
25	GUBERNUR SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	2,173,854,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	845,000,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	371,682,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrolagian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	642,172,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		Layanan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitasi Ekspor Impor		
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	315,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
26	GUBERNUR SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	2,761,041,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	856,000,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	351,872,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	689,684,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		Layanan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitas Ekspor Impor		
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	305,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
		PENINGKATAN FASILITASI PASAR LELANG DAN SISTEM RESI GUDANG DAERAH	558,485,000	BAPPEBTI
		Pengembangan Kegiatan Pasar Lelang Daerah		
		Penyelenggaraan Pasar Lelang		
		Pengembangan Pranata Pendukung Pasar Lelang		
27	GUBERNUR SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	2,269,799,000	
	TENGGARA	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	648,200,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitas Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	322,922,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	686,952,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		Layanan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	315,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
		PENINGKATAN FASILITASI PASAR LELANG DAN SISTEM RESI GUDANG DAERAH	296,725,000	BAPPEBTI
		Pengembangan Kegiatan Pasar Lelang Daerah		
		Penyelenggaraan Pasar Lelang		
		Pengembangan Pranata Pendukung Pasar Lelang		
28	GUBERNUR GORONTALO	GORONTALO	2,170,214,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	741,000,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	313,152,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	590,552,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		Layanan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitas Ekspor Impor		
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	310,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
		PENINGKATAN FASILITASI PASAR LELANG DAN SISTEM RESI GUDANG DAERAH	215,510,000	BAPPEBTI
		Pengembangan Kegiatan Pasar Lelang Daerah		
		Penyelenggaraan Pasar Lelang		
		Pengembangan Pranata Pendukung Pasar Lelang		
29	GUBERNUR SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	1,929,258,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	809,674,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitas Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	313,792,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	490,792,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		Layanan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitasi Ekspor Impor		
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	315,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
30	GUBERNUR MALUKU	MALUKU	2,552,382,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	798,860,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	373,522,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,050,000,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		3. Partisipasi pada Forum Koordinasi Perdagangan Lintas Batas		
		Layanan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitas Ekspor Impor		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	330,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
31	GUBERNUR MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	2,340,816,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	837,600,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitas Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	364,982,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	808,234,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		3. Partisipasi pada Forum Koordinasi Perdagangan Lintas Batas		
		Layanan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitasi Ekspor Impor		
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	330,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
32	GUBERNUR PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	2,255,695,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	816,750,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	414,682,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrolagian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	674,263,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		Layanan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitas Ekspor Impor		
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	350,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
33	GUBERNUR PAPUA	PAPUA	2,498,645,000	
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	823,760,000	DITJEN PDN
		Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah		
		1. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok		
		2. Fasilitas Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		
		3. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan		
		Peningkatan Iklim Usaha di Daerah		
		1. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan		
		2. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah		
		Pengembangan Pasar Domestik di Daerah		
		1. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan		
		2. Pengembangan Promosi UMKM Daerah		
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	375,382,000	DITJEN SPK
		Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen		
		1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah		
		2. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah		
		3. Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	959,503,000	DITJEN DAGLU
		Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi		
		1. Partisipasi pada Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
		2. Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH (RUPIAH)	UNIT KERJA
		Pembinaan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		2. Partisipasi pada Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri		
		Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah		
		1. Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan Instansi Terkait di Daerah		
		2. Forum Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Terpadu		
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah		
		2. Penyusunan Komoditi Potensial dan Unggulan Daerah		
		3. Partisipasi pada Forum Koordinasi Perdagangan Lintas Batas		
		Layanan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri		
		1. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online		
		2. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA)		
		SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri		
		1. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitasi Ekspor Impor		
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bagi Pejabat/Staff BPSMB		
		PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	340,000,000	DITJEN PEN
		Promosi UKM Daerah		
		1. Partisipasi UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta		
		2. Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Lainnya		
		Informasi Produk Unggulan Daerah		
		1. Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) Daerah		
J U M L A H			73,750,000,000	

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,


 LASMININGSIH